

10-30-2022

MULTIKULTURALISME DI ASIA TENGGARA: SUATU TINJAUAN AWAL

Yuda B. Tangkilisan

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, yebete@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura>



Part of the [Other Languages, Societies, and Cultures Commons](#), [Philosophy Commons](#), and the [South and Southeast Asian Languages and Societies Commons](#)

Recommended Citation

Tangkilisan, Yuda B. (2022) "MULTIKULTURALISME DI ASIA TENGGARA: SUATU TINJAUAN AWAL,"

Multikultura: Vol. 1: No. 4, Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura/vol1/iss4/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Multikultura by an authorized editor of UI Scholars Hub.



MULTIKULTURALISME DI ASIA TENGGARA: SUATU TINJAUAN AWAL

Yuda B. Tangkilisan

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Dewasa ini, Multikulturalisme sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hal itu karena kemajuan teknologi informasi ketika jarak sosial jauh lebih dekat dengan komunikasi multimedia. Multikulturalisme adalah istilah yang memiliki lebih dari satu makna dan ruang lingkup. Ini memiliki rentang makna mulai dari konsep, sikap, jenis pendidikan, studi hingga politik atau kebijakan publik. Tulisan ini membahas tentang multikulturalisme di Asia Tenggara, dari perspektif multidimensi historis, yang didasarkan pada sumber-sumber tertulis sekunder sebagai studi pendahuluan. Temuan menunjukkan bahwa ada beberapa konteks masalah, yaitu intra-, antar negara dan lingkup ASEAN. Konflik sosial, etnis dan budaya memiliki akar sejarah kolonialisme dan imperialisme barat yang memperkenalkan politik dan kebijakan pemisahan, segregasi, diskriminasi dan *divide et impera* di antara orang-orang terjajah yang dieksploitasi. Tampaknya nasionalisme dan negara-bangsa tidak memiliki cukup faktor pengintegrasikan untuk menyatukan perbedaan etnis dan budaya. Oleh karena itu, multikulturalisme berperan penting dan berpengaruh besar untuk menciptakan ruang interaksi yang damai dan adil untuk mengatasi sumber konflik yang bersumber dari perbedaan. Orang-orang dan negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bagaimana menciptakan dan menghidupkan kehidupan multikulturalisme.

KATA KUNCI: Multikulturalisme, Asia Tenggara, Kolonialisme dan Imperialisme, Perbedaan Budaya

PENDAHULUAN

Dewasa ini, ruang resmi dan publik dalam cakupan multimedia memperlihatkan kehadiran dan perkembangan multikulturalisme. Keadaan dan perkembangan sosial budaya berbagai bangsa dalam derap kemajuan ekonomi dan teknologi terutama di bidang komunikasi menjadikan multikulturalisme sebagai bagian dalam kehidupan yang menekankan pada kebersamaan dan kerjasama. Globalisasi telah menjalin keragaman bangsa-bangsa dan budaya, dalam interaksi sosial dan mengarah pada suatu kebutuhan dan keniscayaan suatu kerja sama internasional agar mampu menyintas dari berbagai tantangan dan ancaman yang ada. Kesadaran pemeliharaan bumi seperti menjaga kelestarian lingkungan hidup dan eksplorasi bersama ruang angkasa merupakan perwujudan keprihatinan dan arah dari interaksi antar bangsa tersebut. Dalam pengalaman global tersebut, termasuk keadaan nasional masing-masing bangsa, memunculkan kesadaran akan keragaman, terutama dalam budaya. Setiap etnik dan bangsa memiliki budaya atau kebudayaan masing-masing.



Kebudayaan dunia memperlihatkan sejumlah unsur universal yang tampak pada setiap budaya etnik dan bangsa. Setidaknya ada 7 unsur universal kebudayaan, yakni Sistem Religi, Mata Pencapaian Hidup (Ekonomi), Organisasi Sosial, Teknologi, Kognisi (Ilmu Pengetahuan), Bahasa dan Kesenian. Barangkali penambahan unsur itu dapat dilakukan seperti Reproduksi dan Rekreasi (Olah Raga dan Pariwisata). Namun, unsur-unsur universal itu tidak dapat menjalin keserasian dan keharmonisan hubungan dan interaksi keberagaman kultural. Sehubungan itu, suatu kesadaran, pandangan, sikap hingga kebijakan diperlukan untuk membangun dan membina kehidupan sosial yang majemuk dalam nuansa harmonis, tanpa konflik yang membawa perpecahan dan kehancuran. Perbedaan memerlukan penanganan dan pengelolaan agar menjadi perekat kebersamaan dan kerjasama serta kekuatan ketika bersinergi dalam menghadapi ancaman dan tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Latar belakang kemunculan Multikulturalisme, baik sebagai suatu kesadaran, kerarifan hingga kajian, tidak terlepas dari perkembangan zaman dan interaksi. Perkembangan zaman mendorong difusi kebudayaan dan akulturasi seiring dengan perkembangan pengetahuan geografi dan teknologi angkutan, yang selanjutnya mendorong dan menjelma menjadi globalisasi. Jalur Sutra merupakan jalinan dan jaringan komunikasi dan globalisasi melalui daratan antara Asia dengan Eropa. Revolusi pelayaran mendorong globalisasi melalui jalur laut dan pelayaran hingga mencapai kawasan Asia Tenggara, Amerika dan Oseania. Di balik globalisasi maritim itu muncul kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan politik, kapitalisme dan teknologi menghasilkan krisis global dan konflik besar antar bangsa yang dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh budaya yakni Perang Dunia I, II dan Perang Dingin, yang sempat menggoyahkan sendi-sendi kolonialisme dan imperialisme dan menghadirkan sejumlah bangsa-bangsa baru. Namun, pasca Perang Dunia II melalui perkembangan kapitalisme dan teknologi pula muncul neo-kolonialisme dan imperialisme

Kemunculan bangsa-bangsa itu terkait erat dengan kesadaran, emansipasi dan nasionalisme yang melampaui batas-batas etnis, etnisitas dan budaya. Permasalahan sosial dan budaya yang telah muncul sejak masa kolonialisme dan imperialisme itu, walau tidak semua bangsa terutama di Asia Tenggara mengalaminya, tidaklah mereda dan menghilang melalui kebangkitan bangsa, kebangsaan (nasionalisme) dan kemerdekaan. Hubungan antar warga dalam balutan etnis dan budaya etnis memperlihatkan ketidakharmonisan (*disharmony*), ketidakseimbangan (*unbalance*) dan ketidaksetaraan (*unequal*). Perbedaan budaya (*cultural differences*), selain politik dan ekonomi, menjadi faktor penyebab yang penting. Dalam ranah dan konteks itu, keberagaman etnis dan budaya menjadi relevan, signifikan dan interesan hingga berkembanglah multikultur dalam ruang dan kiprahnya, yang menjadi multikulturalisme.

Berbagai bangsa yang majemuk, termasuk Eropa dan Amerika memiliki pengalaman panjang dan menonjol dalam hubungan antar etnik dan budaya. Bangsa Amerika terbentuk dari imigrasi, interaksi dan integrasi dari berbagai nasionalitas dan kultur dari berbagai penjuru dunia, yang membentuk mosaik dan miniatur bangsa dan budaya mondial (global). Pengalaman kontroversial dan negatif berawal dari ranah hubungan kelompok keturunan Eropa, terutama Anglo-Saxon, dengan kelompok Indian Amerika dan Afro-Amerika, yang berlanjut dengan kelompok keturunan Irlandia dan Asia, terutama Cina dan Jepang. Berbagai faktor memainkan peranan dan memberikan pengaruh penting dalam hubungan-hubungan tersebut, mulai dari



rasialisme hingga faktor ekonomi. Dalam kajian Amerika Serikat, seperti tentang karakter sosial dan nasional, sejak awal abad 20, muncul pandangan *melting pot*, *salad bowl* dan multikulturalisme dalam perspektif Takdir (*Manifest Destiny*), Pekuliaritas (*Peculiarism*) dan Eksepsionalitas (*Exceptionalism*) Amerika Serikat.

Masalah Multikulturalisme memperlihatkan relevansi, signifikansi dan kontribusi juga di kawasan Asia Tenggara, yang kini tergabung dalam perkumpulan kawasan (regional) Association of South East Asian Nations (ASEAN). Asia Tenggara terbentuk dan berkembang dalam dinamika dan perubahan sejarah dalam lintasan pengaruh lintas kawasan dan globalisasi. Dewasa ini, dalam kehidupan bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang terdiri atas 10 bangsa dan negara, hubungan antar warga atau etnis dan budaya memperlihatkan keadaan, perkembangan dan perubahan yang menarik, relevan dan penting untuk disimak dan dipelajari, terutama untuk perbandingan dan masukan untuk kajian atau studi Indonesia, dan tentunya untuk perkembangan bangsa Indonesia (Brown 1994; Tarling & Gomez 2008; Croissant & Lorenz 2016).

Mempelajari Multikulturalisme di Asia Tenggara memerlukan berbagai sudut pandang dan lintas disiplin. Namun, perspektif sejarah mampu memainkan peranan dan memberikan sumbangsih utama dalam menelusuri permasalahan dan penjelasannya dalam pemahaman yang utuh, kontekstual, sezaman, kronologis dan kritis. Dalam mengamati dan menganalisis keadaan dan perkembangan sejarah, berbagai faktor penyebab muncul, mulai dari politik, ekonomi, sosial hingga budaya dalam interaksi masyarakat, baik internal maupun eksternal. Kepentingan, visi dan peluang merupakan faktor pendorong dalam multidimesionalisme penyebab tersebut, yang diwarnai oleh keadaan dan perkembangan yang harmonis dan konflik, serta kontinuitas dan diskontinuitas.

Selanjutnya, Asia Tenggara merupakan suatu kesatuan geografis yang terdiri atas dan terbagi ke dalam kesatuan geopolitik berupa negara yang berdaulat. Sebagai kesatuan geografi, yang memiliki ranah-ranah geoekonomi, geostrategis dan geokultural, Asia Tenggara memperlihatkan sejumlah persamaan dan perbedaan. Kemudian dari faktor geostrategi, Asia Tenggara memiliki pengalaman interaksi antar kawasan dan budaya yang sama dan berbeda dalam jalinan dan jaringan interaktif yang siklis (berulang), evolusioner (perkembangan) dan dialektis (perubahan). Keadaan dan perkembangan kawasan itu memberikan pengaruh dan dampak pada keadaan dan perkembangan berbagai bangsa yang ada dan mendiaminya. Dalam globalitas dan intensitas interaksi, kemajuan dan kemunduran bangsa-bangsa Asia Tenggara sedikit banyak bergantung pada kesadaran kebersamaan (geografi, geoekonomi dan geostrategi), keberagaman (*multisity/plurality*) dan kerjasama, yang dapat ditunjang oleh multikulturalisme.

Historiografi Asia Tenggara sebagai suatu unit kajian setidaknya muncul ketika D.G.E. Hall (1987) memperkenalkan karyanya pada tahun, yang kini sudah diterjemahkan ke sejumlah bahasa Asia Tenggara, termasuk bahasa Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh Hall lebih pada peristiwa dan masalah politik. Juga George Coedes (2010) menggunakan sudut pandang yang tidak jauh berbeda dalam membahas Asia Tenggara masa Indianisasi. Kemudian, David Joel Steinberg dan rekan-rekannya (1987) memperkenalkan pendekatan yang berbeda berupa Sejarah Sosial, yang memunculkan kategori dan permasalahan sosial, tidak lagi pada jejak kaki orang besar, dalam konteks kajian Asia Tenggara. Setelah itu berbagai tema bermunculan, termasuk



tentang perbedaan kebudayaan seperti karya David Brown (1994) dan ekonomi seperti perdagangan oleh Anthony Reid (2011), termasuk Benedict Anderson (2001) tentang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan, dan karya Nicholas Tarling tentang nasionalisme (2004) serta bersama Edmund Terrence Gomez (2008) tentang negara dan identitas multietnik. Lalu karya F. von der Mehden membicarakan agama dan modernisasi (1986). Sebelumnya, suatu karya menarik suntingan Taufik Abdullah (1982) tentang kaitan agama, etos kerja dan perkembangan ekonomi. Sartono Kartodirdjo menyunting dua karya berkenaan dengan Asia Tenggara mengenai elite dan kepemimpinan ((1990; 1993). Selain itu, permasalahan tentang ASEAN juga memperoleh perhatian pada sejumlah karya dalam beragam cakupan dan pokok bahasan (Anwar 1994; Association of Southeast Asian Nations 2010; Dam & Riswandi 1995; Luhulima 1998; Severino 1999).

Etimologi, Batasan dan Ruang Lingkup

Multikulturalisme berasal dari bentukan kata multikultur (*multiculture*) dan isme (*ism*). Selanjutnya, bentukan kata multikultur, dari kata multi (jamak atau banyak) dan kultur, yang artinya berbagai atau keragaman budaya, dapat dikembangkan menjadi multikultural, multikulturalis, multikulturalistik dan mungkin juga multikulturisasi dan multikulturalisasi hingga demultikulturalisasi, transmuitkulturalisasi, postmulticulturalism dan seterusnya. Kata multi adalah prakategorial, yakni kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan menjadi berarti apabila dibersanding dengan kata lain, dalam hal ini adalah *culture* atau kultur. Secara harafiah, Multikulturalisme berarti pandangan atau ajaran tentang keragaman budaya. Namun, istilah ini terbentuk dari kata multikultural, bukan multikultur yang seharusnya menjadi multikulturisme (*multiculturalism*), sehingga membuka ruang untuk pemahaman yang lebih banyak dan luas.

Menurut Lawrence Blum (1991) dalam karya Akhyar Yusuf Lubis (2015: 172), Multikulturalisme adalah “sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui keseluruhan aspek budaya tersebut melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai-nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Kemudian C.I. Bennet (1995) dalam karya Akhyar Yusuf Lubis (2015: 172), menyatakan bahwa pengertian Multikulturalisme sebagai pemikiran dan penerimaan pada keanekaragaman budaya. Dapat dikatakan juga, Multikulturalisme merupakan faham atau keyakinan yang mendorong penerimaan atas pluralisme atau keberagaman budaya sebagai suatu model budaya yang hadir dalam kehidupan sosial budaya kontemporer.

Sementara batasan dan ruang lingkup Multikulturalisme juga dapat disimak dari penjelasan berikut, yakni: “*Multiculturalism is not about difference and identity per se but about those that are embedded in and sustained by culture; that is a body of beliefs and practices in terms of which a group of people understand themselves and the world and organize their individual and collective lives...Multiculturalism, then, is about cultural diversity or culturally embedded differences...Although part of the politics of recognition, multiculturalism is a distinct movement maintaining an ambivalent relationship to it*” (Parekh 2000: 2-3).



Kemunculan Multikulturalisme setidaknya dapat ditelusuri sejak tahun 1970-an. Tahun-tahun itu merupakan bagian dari masa Perang Dingin dan ditandai oleh berbagai gejolak dan perubahan. Masa itu ditandai oleh eskalasi Perang Vietnam, yang melibatkan sejumlah negara yang sedang bertentangan secara ideologi. Di Amerika Serikat, keadaan masa itu tidak terlepas dari masa sebelumnya yang diwarnai oleh Gerakan Hak-hak Sipil (*Civil Rights Movement*) (Rogers 1996 dalam karya Lubis 2006: 172), di bawah pimpinan pendeta Martin Luther King, Jr. sebagai wujud emansipasi dan perjuangan kelompok yang terbedakan dan tertindas hak-haknya, baik etnis maupun gender di Amerika Serikat, seperti Afro-Amerika, Indian, El Chicano atau Hispanik Amerika, Perempuan, LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan lainnya untuk persamaan dan kesetaraan. Seraya itu, kajian Amerika mengembangkan wacana Multikulturalisme untuk menjelaskan keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat dan bangsanya (Ritzer 2003: 322--324. Dalam Lubis 2006: 172)

Batasan Multikulturalisme secara umum merujuk pada pandangan atau ajaran (isme) tentang keragaman budaya. Pandangan dan pemikiran itu juga memperlihatkan keragaman terutama tentang sikap dan tindakan terhadap keragaman tersebut. Selanjutnya, Multikulturalisme telah memasuki ruang-ruang kekuasaan dan pemerintahan, menjadi sebuah landasan dan substansi legal dan hukum, berupa peraturan dan kebijakan, yang diperlukan untuk mengatur ruang politik dan menciptakan ketertiban serta hubungan yang harmonis antar warga dan kelompok etnis. Sehubungan itu, ruang Lingkup pemahaman Multikulturalisme, berdasarkan bentuk kata Multikultural, meliputi mulai dari keadaan, kesadaran, sikap, pandangan, kajian, strategi, pendidikan hingga politik dan kebijakan.

Sebagai wacana budaya, Multikulturalisme memiliki sejumlah nilai budaya (*cultural values*) sebagaimana sebagai pengetahuan, panduan (acuan) dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Nilai-nilai Budaya itu antara lain adalah Pengakuan, Penghargaan, Kesetaraan, Toleransi, Perbedaan, Keterbukaan/ Inklusif, Penerimaan, Kebersamaan, Komunikatif, Interaktif, Harmonis, Serasi, Damai, Konsensus, Penyesuaian, Perubahan, Tanpa Pemaksaan, Tanpa Penekanan, Tanpa Ancaman, Tanpa Prasangka, Pengayoman, Selaras, Mutual Simbioses, Integratif, Persatuan, Kerjasama (Koperatif), Kritis, dan Rasional.

Pembahasan ini berkenan dengan Asia Tenggara. Istilah dan penyebutan ini berasal dari masa akhir Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik atau yang dikenal juga sebagai Perang Pasifik dan Asia Timur Raya menurut versi pihak Jepang. Dalam pembicaraan pembagian wilayah yang dilanda konflik yang akan diambilalih dari pihak Jepang, setelah kalah perang, di kalangan Sekutu (*Allied Forces*), sebagai pemenang perang, muncul penyebutan suatu kawasan yang terdiri atas suatu wilayah yang sebelumnya bukan koloni, yakni Muang Thai dan bekas koloni jajahan, seperti Hindia Belanda, Burma dan Semenanjung Malaya termasuk Singapura dan Borneo Utara Inggris dan Filipina Amerika, dalam pembentukan suatu komando, yaitu South East Asia Command, atau Komando Asia Tenggara. Awalnya setelah merdeka, beberapa negara itu mencoba membentuk suatu pakta kerjasamaregional di bawah pengaruh Perang Dingin dan intervensi Amerika Serikat, seperti SEATO (Southeast Asia Treaty Organization), Association of Southeast Asia (ASA) selain Maphilindo yang merupakan pendahulu ASEAN (Luhulima 1998: 39; Anwar 1994: 49—54)).



Selain Asia Tenggara, juga dikenal kawasan Indocina Prancis, yang terdiri atas Vietnam yang sempat terbagi menjadi Vietnam Selatan dan Utara, Laos dan Kamboja (Khmer).

Perkembangan ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967 yang diprakarsai 5 negara yakni Indonesia, Muang Thai, Malaysia, Singapura, dan Filipina dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 ((Dam & Riswandi 1995: 57; Anwar 1994: 54). Keanggotaannya kemudian meliputi Brunei Darussalam dan Burma (Myanmar) hingga kehadiran anggota-anggota lainnya seperti Vietnam, Laos, Kamboja dan berikutnya Timor Leste. Secara etnis dan budaya, penduduk negara-negara ASEAN memiliki pertalian dengan Asia Timur (Cina dan Jepang), Asia Selatan (India) dan Asia Barat (Yaman). Sebagiannya bertalian leluhur dengan kawasan Pasifik, seperti Melanesia. Dalam perkembangan historis-kultural, difusi dan akulturasinya memperlihatkan kedatangan dan pengaruh dari kawasan-kawasan tersebut dan Eropa serta Amerika Serikat. Pengalaman interaksi itu memunculkan keragaman budaya intra dan antar negara-negara ASEAN yang membentuk pola pemahaman, hubungan dan kerjasama, termasuk gejala, pertentangan dan konflik sosial politik yang timbul. Pasca Perang Dingin memperlihatkan keadaan dan perkembangan sebagaimana yang disinyalir oleh Samuel Huntington (1996) sebagai benturan antarperadaban (*clash of civilizations*). Hubungan resmi antar negara itu diikuti pula oleh unsur-unsur politik dan masyarakat masing-masing negara yang menjalin dan membentuk wadah komunikasi, kesepahaman dan kerjasama, seperti kerjasama antar parlemen, media, pendidikan dan lainnya. Walau, ASEAN tidak selalu menjadi wadah kerjasama yang seutuhnya dan penyelesaian pertentangan dan konflik yang terjadi di antara negara-negara anggotanya (Vatikiotis 2017).

Multikulturalisme di Asia Tenggara

Asia Tenggara memiliki keragaman geografi, topografi dan morfologi, mulai dari daratan dan perairan, serta benua dan kepulauan. Daratan memperlihatkan daerah pesisir dan pedalaman, dan dataran rendah, lembah, dan dataran tinggi, pegunungan. Perairan meliputi danau, sungai, pinggiran pantai, selat, teluk, laut dan samudera (lautan). Umumnya, iklim di Asia Tenggara mengenal musim penghujan (basah) dan kemarau (kering). Angin muson dan pasat berhembus sesuai dengan musimnya yang membawa pelayaran dari dan ke sejumlah tempat, termasuk melintasi perairan dan daratannya. Kawasan Asia Tenggara dikelilingi oleh perbatasan darat dan air, dengan sejumlah negara dan lautan,

Keadaan alam membentuk pola pemukiman, gerak dan perekonomiannya. Bentuk pemukiman awal mengenal penduduk dataran rendah (*lowland*) dan tinggi (*upland people*), yang memperlihatkan gelombang migrasi dan pemukiman. Penduduk dataran rendah dan pesisir lebih terbuka dan mudah berinteraksi dengan kelompok lainnya yang datang atau melintas. Sementara, penduduk dataran tinggi lebih jarang bertemu dan berkomunikasi dengan kelompok lainnya. Namun dalam suatu mekanisme, berdasarkan kebutuhan hidup, tidak jarang terjadi pertukaran antara kedua jenis penduduk atau masyarakat tersebut (Steiberg dkk. 1987; Kartodirdjo 1983).

Pemukiman semakin meluas seraya proses difusi, migrasi dan akulturasi. Sebagian besar masyarakat Asia Tenggara mengenal Indianisasi dan Sinosasi (persebaran masyarakat dan budaya India dari Asia Selatan dan Cina dari Asia Timur). Jalur Sutera, yang memerlukan dan mendorong



berbagai kebutuhan dan komoditas niaga, menjadi faktor pendorong proses tersebut, selain penyebaran agama, seperti Sidharta Gautama yang membawa Budhisme dari India ke Cina. Ketika Jalur Sutra daratan, yang bermula dari Asia Timur hingga ke Asia Tengah dan Barat mengalami persoalan terutama keamanan perjalanan, muncul jalur Sutra Laut, yang bermula dari India melintasi Samudera Hindia ke pesisir barat pulau Sumatra dan Selat Malaka hingga mencapai Asia Timur di Canton, yang membawa Hinduisme. Sementara, proses penyebaran budaya Cina berlangsung dari arah sebaliknya. Dalam proses tersebut berdiri dan berkembang bentuk politik berupa kerajaan yang bercorak Hinduisme dan Budhisme. Konsep kekuasaan dan pemerintahan Dewaraja yang bersifat ilahi, eksklusif dan turun temurun mewarnai kehidupan politik di beberapa wilayah. Selain itu, berkembang pula *hydraulic society* yang despotik, masyarakat berstruktur renggang (*loosely structured society*) dan birokrasi mandarin (Evers 1980 & Kartodirdjo 1983, 1990). Bentuk kerajaan dikenal juga kerajaan pedalaan yang bertumpu pada sektor agrarian dan pesisir yang mengembangkan perdagangan. Ketika pelayaran dan perdagangan Eropa tiba di Asia Tenggara, mereka menemukan pola perdagangan kawasan yang telah berkembang dan masyarakat yang majemuk.

Kemudian, melalui jalur pelayaran, muncul masyarakat dan budaya Asia Barat, yang membawa kepercayaan Islam. Proses Islamisasi lebih berkembang di wilayah kepulauan dan semenanjung, yakni di Indonesia, Malaysia, Patani Muang Thai, Brunai Darussalam dan Filipina selatan. Sementara di kawasan daratan benua Asia, proses tersebut tidak berlangsung secara luas. Di beberapa tempat, terjadi sinkretisasi antara Islam dengan kepercayaan sebelumnya, yakni Hinduisme dan Budhisme. Islamisasi yang lebih mendalam terjadi hampir bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa, yang diawali oleh Portugis dan Spanyol, yang membawa kepercayaan Katolik. Selanjutnya, Belanda membawa kepercayaan Protestan.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat membawa perubahan besar di Asia Tenggara. Nerawal dari kepentingan perdagangan yang ditrapkan melalui monopoli dan dukungan militer, kehadiran mereka berkembang menjadi kolonialisme, sesuai dengan perkembangan zaman terutama Pasar, Kapitalisme dan Teknologi. Dalam kepentingan kolonialisme, hubungan antar kelompok etnik dan budaya yang ada mulai mengalami guncangan karena kebijakan-kebijakan yang mengadu domba untuk penguasaan dan pengerahan sumber daya alam dan manusia. Tesirat di balik kebijakan-kebijakan kolonial, yang berkaitan dengan penyebab ketegangan dan konflik antar kelompok etnik lokal, adalah politik *divide et impera* dan modernisasi ala Barat atau westernisasi dalam pengenalan kepercayaan dan pendidikan.

Sebagai akibatnya, berlangsung perubahan sosial di kalangan masyarakat jajahan, seiring dengan modernisasi, birokratisasi, militerisasi, komersialisasi dan kristenisasi. Sebagian kelompok sosial colonial mendapat peluang yang terbuka untuk menjadi bagian alam kehidupan jajahan (*colonial realm*), baik di bidang politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial, seperti pendidikan dan agama. Seraya itu, muncul kelompok elite modern yang berlatarbelakangkan pendidikan Barat kolonial yang mengisi sejumlah profesi dalam kehidupan kolonial, seperti dokter, guru, jurnalis dan lainnya (Brown 1994; Tarling 2004). Namun, sebagian besar lainnya mengalami eksploitasi dan tidak memperoleh atau tidak mau memanfaatkan kesempatan dan peluang yang terbuka.



Dampak dari penerapan kepentingan dan kebijakan kolonialisme adalah gerakan-gerakan sosial dan politik. Gerakan-gerakan penolakan itu merupakan refleksi dari perubahan sosial yang berlangsung yang telah mengubah tatanan dan struktur kehidupan masyarakat tradisional. Sebagian gerakan-gerakan itu menggunakan ajaran dan simbol keagamaan dan lainnya ideologi modern, seperti Komunisme dan Nasionalisme. Kemerdekaan dan kebangsaan selanjutnya tidak selalu berhasil dalam mengakomodasikan dan mengelola dan menyaserasikan perbedaan-perbedaan dan pertentangan sosial budaya peninggalan kolonialisme. Dalam konteks itu, dewasa ini timbul kesadaran dan wawasan pengembangan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui berbagai wacana, wahana dan media dalam ranah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa hal yang penting dalam pembangunan masyarakat dan bangsa yang multikultural antara lain adalah pengembangannya di ranah pendidikan dan politik, yang memperlihatkan corak-corak di antara perspektif religionisme hingga sekularisme.

Kemudian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Multikulturalisme di Asia Tenggara setidaknya muncul dan berkembang di sejumlah ranah dan konteks, yakni batasan politik yakni negara dan bangsa, antar negara Asia Tenggara baik secara bilateral maupun multilateral dan dalam konteks ASEAN yang *multinations*, yang tampak kerjasama-kerjasama di sejumlah bidang (Anwar 1995; Association of Southeast Asia Nations 2009). Terkadang, batasan dan ranah tersebut tidak bertalian satu dengan lainnya, namun dalam beberapa peristiwa dan konteks tertentu, ketiganya dapat saling bersilangan untuk pengaruh dan mempengaruhi.

Pemahaman dan penjelasan mengenai keadaan dan perkembangan Multikulturalisme di berbagai negara Asia Tenggara dapat diketahui melalui kedudukan atau rankingnya dalam hubungan antar etnik dan budaya (Tarling & Gomez 2008; Croissant & Lorenz. 2016). Parameter keadaan itu berdasarkan pada intensitas konflik sosial budaya yang terjadi sejak dekolonisasi dan awal kemerdekaan, yang diamati secara acak. Terkait dengan keadaan itu adalah latar belakang, masalah dan penyebab pertentangan serta bentrokan, yang dapat dirinci sebagai politik, ekonomi, pendidikan, kepercayaan dan lainnya, yang selanjutnya menjadi ciri konflik (Vatikiotis 2017; Croissant & Lorenz. 2016: 7). Negara yang menduduki peringkat atas atau awal memiliki tingkat multikulturalisme yang tinggi dan baik. Penyusunan itu antara lain adalah:

Urutan	Negara	Bentuk Negara dan Falsafah atau Ideologi	Penyebab Konflik Sosial Budaya
1.	Brunai Darrussalam	Monarki dan Islam	Hampir tidak ada karena homogenitas religi
2.	Vietnam	Republik dan Komunisme	Hampir tidak ada karena kekuasaan yang absolute
3.	Laos	Monarki dan Komunisme	Hampir tidak ada karena homogenitas etnis yang tinggi
4.	Timor Leste	Republik dan Katolikisme	Hampir tidak ada karena homogenitas religi yang kuat



5.	Singapura	Republik dan Sekuler	Jarang terjadi dan penyebabnya kesenjangan ekonomi
6.	Malaysia	Monarki dan Islam	Terjadi dan karena masyarakat plural atas ras
7.	Kamboja	Republik dan Budhisme	Terjadi dan karena perbedaan keyakinan
8.	Muang Thai	Monarki dan Budhisme	Terjadi dan karena perbedaan keyakinan serta hubungan pusat-daerah (Patani)
9.	Indonesia	Republik dan Pancasila	Terjadi dan karena perbedaan etnis, kepercayaan dan ekonomi
10.	Filipina	Republik dan Katholikisme	Terjadi dan karena perbedaan kepercayaan dan daerah (Moro)
11.	Myanmar	Junta Militer dan Budhisme	Terjadi dan karena perbedaan etnis dan kepercayaan (Rakhine)

Dari gambaran perbedaan, pertentangan dan konflik tersebut, pengaruh terhadap hubungan antar negara di Asia Tenggara timbul dan umumnya menghasilkan suatu prakarsa rekonsiliasi di tingkat pemerintahan melalui sarana diplomasi dan hubungan diplomatik. Sementara itu, di kalangan masyarakat di negara-negara itu terkadang timbul gerakan solidaritas yang mendukung pihak yang menjadi sasaran konflik sosial budaya itu berupa aksi unjuk rasa di kedutaan negara dimana terjadi peristiwa tersebut dan penggalangan dukungan dana, bantuan kesehatan hingga tenaga sukarela. Gerakan dukungan itu umumnya tidak menimbulkan konflik resmi antar negara, walau kerap dalam seruan-seruan ketika berdemonstrasi itu menyinggung pemutusan hubungan diplomatik hingga mendorong perang. Permasalahan yang terkadang timbul dan menyangkut Indonesia adalah perlakuan terhadap pekerja migran Indonesia, seperti di Malaysia dan Singapura.

Dari pembahasan tentang multikulturalisme di Asia Tenggara yang memperlihatkan beberapa ranah dan lapisan politik, sosial dan budaya, tampaknya terbuka peluang untuk menghadirkan dan memperkenalkan suatu model yang dapat disebut sebagai Multikulturalisme Asia Tenggara. Model ini memberikan gambaran dan memperlihatkan latar belakang kemunculan masalah multikulturalisme dalam kawasan yang sebenarnya sedemikian beragam (*diversity*) namun harmonis dan tidak rawan konflik sosial dan budaya, hingga kedatangan dan perkembangan kolonialisme Barat, yang berlandaskan pada Kapitalisme, Industrialisme dan Teknologi. Selanjut, model ini menunjukkan bagaimana dinamika masyarakat, etnik dan budaya masing-masing bangsa dan negara itu menghadapi, menangani, mengelola dan mengatasi perbedaan, pertentangan dan konflik yang terjadi, yang juga muncul di tingkat dan konteks kawasan, yakni antar bangsa dan negara di Asia Tenggara. Model Asia Tenggara ini tampaknya memperoleh relevansi, signifikansi dan kontribusinya dalam kaitan dan perbandingan dengan model Amerika Serikat, yang



berkembang dari *melting pot*, *salad bowl* dan menjadi multikulturalisme (Luedtke 1994), yang ditanggapi sejumlah kalangan kajian Amerika perlu beranjak ke interkulturalisme.

Tentunya, pembentukan dan pengenalan model Multikulturalisme Asia Tenggara ini memerlukan berbagai perangkat dan kerangka analisis kritis, ilmiah dan aktual. Dalam konteks kajian dan perspektif Sejarah, metodologi Sejarah Sosial, Pandangan dari dalam (*view from within*), *Colligation*, Multidimensional dan Sejarah Lisan menjadi relevan, fungsional dan signifikan dalam proses akademik yang akan membawa manfaat besar dalam pemahaman dan penjelasan tentang model tersebut. Dalam ranah kajian wilayah (*area studies*), pendekatan interdisipliner, komparatif dan analitis kritis dalam kaitannya dengan Teori Kritis, Kajian Budaya, dan Poskolonial menjadi kerangka ilmiah untuk mengungkapkan dan menjelaskan model tersebut (Lubis 2006 & 2015). Melalui pengamatan, pendekatan dan pembahasan mendalam dari aliran-aliran posmodernisme dan positivistik itu, wawasan dan pemahaman kritis akan mengungkapkan kepentingan, ideologi, keberpihakan dan eksploitasi di balik perspektif, kajian dan gerakan Multikulturalisme, terutama di Asia Tenggara.

PENUTUP

Multikulturalisme, berlandaskan pada etimologi dan perkembangannya, memiliki batasan dan penafsiran yang jamak, tidak tunggal. Selain itu, Multikulturalisme muncul dan berkembang dalam suatu perjalanan historis, yang berakar pada kajian etnik dan budaya, seperti *Cultural Diversity*. Multikulturalisme hadir dalam struktur sosial yang memperlihatkan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial budaya. Bahkan eksploitasi dan represi kerap mewarnai kehidupan sosial budaya berbagai masyarakat, bangsa dan negara.

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang timbul dan berkembang dalam dinamika lokal, regional dan global. Multikulturalisme di Asia Tenggara, yang memiliki genealogi pada kolonialisme dan imperialisme Barat, memperlihatkan beberapa ranah dan lapisan, seperti konteks per negara yang merdeka dan berdaulat dalam ciri plural dan beraneka dan dalam ranah kawasan, yakni secara bilateral dan multilateral, serta dalam wadah ASEAN.

Dari deskripsi dan kenyataan sosial budaya multikulturalisme di Asia Tenggara, tampaknya muncul dan menjadi menarik dan penting untuk dianalisis lebih lanjut tentang Multikulturalisme Asia Tenggara sebagai suatu model sosial budaya dan ranah kajian dalam kaitannya dengan model-model lainnya, seperti Multikulturalisme Amerika Serikat. Untuk itu, kawasan Asia Tenggara merupakan ranah kajian dan pembahasan yang senantiasa aktual dan multikontribusi untuk memahami, mengungkapkan dan menjelaskan tentang masalah, keadaan, perkembangan dan perubahan sosial budaya di negara-negara yang tercakup di dalamnya.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Taufik (ed.) (1982). *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Anderson, Benedict (2001). *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*. Terjemahan. Yogyakarta: INSIST & Pustaka Pelajar



Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

- Anwar, Dewi Fortuna (1994). *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Association of Southeast Asian Nations (2010). *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat
- Brown, David (1994). *The State and Ethnic Politics in South-East Asia*. London & New York: Routledge
- Coedes, G (2010). *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*. Terjemahan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Croissant, Aurel, Philip Lorenz (2016). *Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political Regimes*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing
- Dam, Sjamsuma, Riswandi (1995). *Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Evers, Hans-Dieter (ed.) (1980). *Sociology of South-East Asia: Readings on Social Change and Development*. Oxford: Oxford University Press
- Hall, D.G.E (1987). *Sejarah Asia Tenggara*. Terjemahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia
- Kartodirdjo, Sartono (ed.) (1983). *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Kartodirdjo, Sartono (ed.) (1990). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Kunio, Yoshihara (1990). *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Terjemahan. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Lubis, Akhyar Yusuf (2006). *Dekonstruksi Epistemologi Modern Dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme, hingga Cultural Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu
- Lubis, Akhyar Yusuf (2015). *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Pers
- Luedtke, Luther S (1994). *Mengenal Masyarakat dan Budaya Amerika Serikat*, 2 Jilid. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Luhulima, James (1998). *Asia Tenggara dan Negara Luar Kawasan yang Mempengaruhinya: Pendekatan Politik dan Keamanan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- von der Mehden, Fred R (1986). *Religion & Modernization in Southeast Asia*. Syracuse, NY: Syracuse University Press
- Parekh, Bhikku (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. New York: Palgrave MacMillan
- Reid, Anthony (2015). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450—1680. Jilid 1: Tanah di Bawah Angin*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Reid, Anthony (2011). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450—1680. Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Severino, Rodolfo C., Jr (1999). *ASEAN Rises to the Challenge*. Jakarta: The ASEAN Secretariat



Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

- Steinberg, David Joel dkk, (eds) (1987). *In Search of Southeast Asia: a Modern History*. Singapore: University of Hawaii Press
- Tarling, Nicholas (2004). *Nationalism in Southeast Asia: 'If the people are with us'*. London & New York: RoutledgeCurzon
- Tarling, Nicholas, Edmund Terence Gomez (eds.) (2008). *The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity and The Nation*. Abington, Oxon & New York: Routledge
- Vatikiotis, Michael (2017). *Blood and Silk: Power and Conflict in Modern Southeast Asia*. London: Weidenfeld & Nicolson,